

# VARIABEL BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Gita Desipradani<sup>1</sup>

[gitadesip@gmail.com](mailto:gitadesip@gmail.com) / 087751132339

Fitri Nuraini<sup>2</sup>

[fttr\\_account@yahoo.co.id](mailto:fttr_account@yahoo.co.id) / 081221735899

<sup>1&2</sup> Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

## ABSTRAK

*Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tentunya laporan keuangan yang disajikan memerlukan pengawasan dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 35 responden. Sedangkan, teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya, sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya, dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya.*

**Kata Kunci :** *standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi staf akuntansi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*

## PENDAHULUAN

Kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tentunya laporan keuangan yang disajikan memerlukan

pengawasan dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Andini (2015) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu :

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi . (Permendagri No. 59 Tahun 2007)”. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan uang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan . Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Definisi ini berbeda dengan hasil penelitian Mokoginta, *et el* (2017) bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Dalam

pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan - pelatihan, dan juga mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian Andini (2015) bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan membahas lebih lanjut tentang variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi, dengan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu : (1) Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah ? (2) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah ? (3) Apakah kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah ?

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Pemerintah Daerah**

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang

melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut, mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

## **2.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan SAP Berbasis Akrual

dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang membedakan antara Laporan Keuangan Perusahaan dengan Laporan Keuangan Pemerintahan adalah terletak pada jenis bidang usaha yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan.

### **2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah :

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

### **2.4 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Unsur SPIP mengacu pada konsep Sistem Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), yaitu meliputi : Lingkungan Pengendalian, Pengendalian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantuan Pengendalian Intern.

### **2.5 Kompetensi Staf Akuntansi**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 mengenai pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi . Dalam setiap individu mempunyai karakteristik kompetensi masing-masing sebagai berikut : (1) Pengetahuan. Pengetahuan pegawai merupakan hal yang penting. Pegawai yang mempunyai kemampuan pengetahuan yang baik maka dapat meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. (2) Keterampilan. Pegawai yang mempunyai kemampuan kerja yang baik, maka akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi. (3) Konsep Diri dan nilai-nilai. Konsep diri dan nilai-nilai dapat ditunjukkan oleh sikap seseorang. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi, sikap dan perilaku pegawai dalam bekerja harus diperhatikan. (4) Karakteristik

Pribadi. Karakteristik pribadi merupakan cerminan bagaimana seorang pegawai mampu/tidak melakukan suatu aktivitas dan tugas (5). Motif. Motif adalah kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya.

## **2.6 Kualitas Laporan Keuangan**

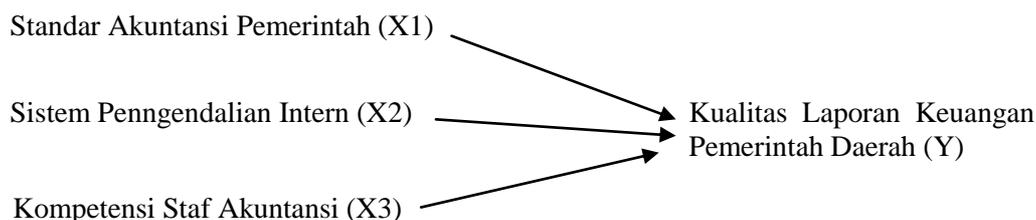
Menurut Bastian (2006 : 99) karakteristik kualitatif merupakan hal yang penting dalam Laporan Keuangan yang bermanfaat bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu : (a) Dapat Dipahami. Karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam Laporan Keuangan Sektor Publik adalah kemudahannya untuk dipahami pengguna. ( b) Relevan. Informasi Laporan Keuangan berkualitas yang dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini dan juga untuk memprediksikan masa depan. (c) Keandalan. Informasi yang berkualitas baik memiliki keandalan. Andal disini dimaksudkan Laporan Keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaanya. (d) Dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan Laporan

Keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Indriya (2013) dengan judul penelitian “pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan”, dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Famela (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh kompetensi pegawai dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Bandung, membuktikan bahwa kompetensi pegawai dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di kota Bandung. Nugraheni (2008) dengan judul penelitian “Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan” dengan hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## 2.8 Kerangka Konseptual



## 2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dan beberapa kajian teoritis yang telah dibahas, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

*H1 = standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.*

*H2 = sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.*

*H3 = kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.*

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel penelitian adalah untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel-variabel penelitian diukur. Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas, yaitu standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi staf akuntansi dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel terikat.

### 3.2 Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Variabel standar akuntansi pemerintahan diukur dengan menggunakan indikator berdasarkan PP No 71 dan diuji dengan 3 (tiga) butir pernyataan yaitu penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan aset, penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian secara wajar. Satuan pengukuran yang digunakan adalah skala Semantic Defferensial.

### 3.3 Sistem Pengendalian Intern (X2)

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh choirunisah (2008) dan diuji dengan 5 (lima) pernyataan mengenai lingkungan pengendalian, pengendalian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantuan pengendalian intern. Satuan pengukuran yang

digunakan adalah skala Semantic Defferensial.

### 3.4 *Kompetensi Staf Akuntansi (X3)*

Kompetensi staf akuntansi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Variabel kompetensi staf akuntansi diukur dengan menggunakan indikator dan diuji dengan 5 (lima) pernyataan mengenai pengetahuan, ketrampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi dan motif. Satuan pengukuran yang digunakan adalah skala Semantic Defferensial.

### 3.5 *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)*

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan indikator dan diuji dengan 4 (empat) pernyataan mengenai dapat dipahami, relevan informasi, keandalan dan dapat dibandingkan. Satuan pengukuran yang digunakan adalah skala Semantic Defferensial. Berikut bobot nilai jawaban kuisisioner responden berdasarkan skala Semantic Defferensial :

Sangat Setuju 4, Setuju 3. Tidak

Setuju 2, Sangat Tidak Setuju 1

Sumber : Sugiyono, 2012

### 3.6 *Populasi dan Sampel*

Objek penelitian ini adalah lokasi di Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Populasinya adalah bagian

akuntansi/keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dengan jumlah populasi sebanyak 35 SKPD. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang bersifat nonprobabilistik.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner dan dokumentasi.

### 3.7 *Teknik Pengumpulan Data*

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, untuk data primer dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 35 SKPD yang bekerja di pemerintah kota surabaya, dengan harapan kembali sesuai jumlah sampel data dalam penelitian ini. Dan data sekunder diperoleh dari bagian akuntansi SKPD dipemerintah kota surabaya dan keterangan lain yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

### 3.8 *Uji Validitas*

Sebuah instrumen memiliki validitas tinggi apabila butir-butir yang membentuk instrumen tidak menyimpang dari fungsi instrumen tersebut. Menurut Ghazali (2013:53) syarat minimum agar suatu butir dapat dianggap valid jika diperoleh nilai  $r$  hitung  $> r$  table.

### 3.9 *Uji Reliabilitas*

Uji reliabilitas ini menggunakan reliabilitas konsistensi internal yaitu teknik *cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Apabila nilai *cronbach Alpha* dari hasil pengujian  $> 0,60$  maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau

variabel itu adalah reliable (Ghozali, 2013 : 48).

Y= Kualitas laporan keuangan

X1= Standar akuntansi pemerintah

X2= Sistem pengendalian intern

X3= Kompetensi staf akuntansi

### 3.10 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak dengan menggunakan metode Kolmogrov Smirnov maupun pendekatan grafik. Menurut Soemarsono (2007) pedoman dalam mengambil keputusan, apakah distribusi data mengikuti distribusi normal jika nilai signifikan atau nilai probabilitas > 0,05.

### 3.11 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik t, yaitu pengujian koefisien secara parsial untuk mengetahui pengaruh secara sendiri-sendiri dari setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Dan untuk menguji pengaruh variabel dengan rumus persamaan regresi :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Nilai konstanta

### 4.1 Hasil Penelitian

Kuisisioner yang disebarkan sebanyak 38 kuisisioner dari Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD). Penyebaran kuisisioner dilakukan pada hari dan jam kerja. Dan setelah dilakukan pengeditan data dan persiapan untuk pengolahan, 3 kuisisioner diputuskan tidak digunakan dalam analisa karena pengisian kuisisioner kurang lengkap dan form kuisisioner kurang. Gambaran selengkapnya mengenai proses penyebaran dan penerimaan kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Gambaran Proses Penyebaran dan Penerimaan Kuisisioner**

Keterangan	Jumlah Kuisisioner
Kuisisioner yang disebar	38
Kuisisioner yang diterima	35
Kuisisioner yang tidak digunakan/diolah	3
Prosentase	100%
Keterangan	Jumlah Kuisisioner
Kuisisioner yang valid	35
Prosentase	92.10%

Berdasarkan data yang diperoleh dari 35 responden, berikut ini dipaparkan mengenai jumlah responden berdasarkan

**Tabel 2 Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	15	43
2.	Perempuan	16	46
3.	Tidak Diisi	4	11
Jumlah		35	100

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa responden berasal dari jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 46%. Hal ini

jenis kelamin, gelar/strata, latar belakang pendidikan dan lama bekerja diposisi bagian akuntansi.

menunjukkan juga bahwa posisi bagian akuntansi lebih didominasi jenis kelamin perempuan.

**Tabel 3 Berdasarkan Gelar/Strata**

No.	Gelar/Strata	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Sarjana	29	83
2.	Non Sarjana	2	6
3.	Tidak Diisi	4	11
Jumlah		35	100

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa responden berasal dari gelar/strata Sarjana yaitu sebesar 83%. Hal ini

menunjukkan juga bahwa posisi bagian akuntansi lebih didominasi memiliki gelar/strata Sarjana.

**Tabel 4 Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Akuntansi	3	9
2.	Non Akuntansi	23	66
3.	Tidak Diisi	9	25
Jumlah		35	100

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa responden berasal dari latar belakang

pendidikan non akuntansi yaitu sebesar 66%. Hal ini menunjukkan juga bahwa

posisi bagian akuntansi lebih didominasi akuntansi.  
memiliki latar belakang pendidikan non

**Tabel 5 Berdasarkan Lama Bekerja Diposisi Bagian Akuntansi**

No.	Lama Bekerja Diposisi Bagian Akuntansi	Jumlah	Prosentase (%)
1.	≤ 1 tahun	4	12
2.	> 1 tahun	20	57
3.	Tidak Diisi	11	31
Jumlah		35	100

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa responden berasal dari lama bekerja diposisi bagian akuntansi > 1 tahun yaitu sebesar 57%. Hal ini menunjukkan juga bahwa posisi bagian akuntansi lebih didominasi lama bekerja diposisi bagian akuntansi > 1 tahun.

Hasil uji validitas untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X1), sistem pengendalian intern (X2), kompetensi staf akuntansi (X3) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dapat dilihat dari tabel-tabel dibawah ini :

#### 4.2 Uji Analisis Data

##### Uji Validitas

**Tabel 6 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X<sub>1</sub>)**

Pernyataan	Koefisien korelasi (r)	Nilai r tabel	Penilaian
X1-1	0.864	0.334	Valid
X1-2	0.864	0.334	Valid
X1-3	0.842	0.334	Valid
X1-4	0.739	0.334	Valid
X1-5	0.896	0.334	Valid
X1-6	0.860	0.334	Valid
X1-7	0.811	0.334	Valid
X1-8	0.710	0.334	Valid
X1-9	0.857	0.334	Valid
X1-10	0.862	0.334	Valid
X1-11	0.823	0.334	Valid

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 11 pernyataan yang terdapat di dalam kuisisioner yang disebarakan kepada bagian akuntansi Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) diperoleh nilai  $r_{hitung}$  antara 0.710

sampai dengan 0.896 yang lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0.334 sehingga 11 pernyataan dianggap valid.

**Tabel 7 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>)**

Pernyataan	Koefisien korelasi (r)	Nilai r tabel	Penilaian
X2-1	0.879	0.334	Valid
X2-2	0.852	0.334	Valid
X2-3	0.854	0.334	Valid
X2-4	0.799	0.334	Valid
X2-5	0.757	0.334	Valid
X2-6	0.771	0.334	Valid
X2-7	0.744	0.334	Valid
X2-8	0.762	0.334	Valid
X2-9	0.834	0.334	Valid
X2-10	0.781	0.334	Valid

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 10 pernyataan yang terdapat di dalam kuisisioner yang disebarakan kepada bagian akuntansi Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) diperoleh nilai  $r_{hitung}$  antara 0.757

sampai dengan 0.879 yang lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0.334 sehingga 10 pernyataan dianggap valid.

**Tabel 8 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Staf Akuntansi (X<sub>3</sub>)**

Pernyataan	Koefisien korelasi (r)	Nilai r tabel	Penilaian
X3-1	0.735	0.334	Valid
X3-2	0.794	0.334	Valid
X3-3	0.768	0.334	Valid
X3-4	0.877	0.334	Valid
X3-5	0.749	0.334	Valid
X3-6	0.647	0.334	Valid
X3-7	0.518	0.334	Valid

X3-8	0.746	0.334	Valid
X3-9	0.727	0.334	Valid

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 9 pernyataan yang terdapat di dalam kuisisioner yang disebarakan kepada bagian akuntansi Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) diperoleh nilai  $r_{hitung}$

antara 0.518 sampai dengan 0.794 yang lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0.334 sehingga 9 pernyataan dianggap valid.

**Tabel 9 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Pernyataan	Koefisien korelasi (r)	Nilai r tabel	Penilaian
Y-1	0.672	0.334	Valid
Y -2	0.874	0.334	Valid
Y -3	0.784	0.334	Valid
Y -4	0.840	0.334	Valid
Y -5	0.621	0.334	Valid
Y -6	0.558	0.334	Valid
Y -7	0.805	0.334	Valid
Y -8	0.695	0.334	Valid
Y -9	0.753	0.334	Valid

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 9 pernyataan yang terdapat di dalam kuisisioner yang disebarakan kepada bagian akuntansi Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) diperoleh nilai  $r_{hitung}$  antara 0.558 sampai dengan 0.874 yang lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0.334 sehingga 9 pernyataan dianggap valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut

memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghazali (2005:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel.

**Tabel 10 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	R Alpha	Hasil
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Y)	0.776	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ )	0.782	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ )	0.782	Reliabel
Kompetensi Staf Akuntansi ( $X_3$ )	0.774	Reliabel

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel 10 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,776, standar akuntansi pemerintah sebesar 0,782, sistem pengendalian intern sebesar 0,782 dan kompetensi staf akuntansi sebesar 0,774. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa pengukuran data sudah dapat dipercaya (*reliable*).

#### 4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Surabaya. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS dengan menggunakan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel 11 berikut ini :

**Tabel 11 Hasil Regresi Linear Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	<b>6.823</b>	3.353			2.035	.051
X1	<b>.297</b>	.121	.418		2.457	.020
X2	<b>.196</b>	.132	.247		1.481	.149
X3	<b>.212</b>	.188	.213		1.130	.267

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan tabel 11 maka penjelasan kualitas laporan keuangan daerah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,823 + 0,297 X_1 + 0,196 X_2 + 0,212 X_3$$

Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi staaf akuntansi memiliki koefisien yang bertanda positif. Penjelasan untuk persamaan diatas adalah : (1) Penerapan standar akuntansi pemerintah yang semakin baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya apabila penerapan standar akuntansi pemerintah kurang baik akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Penerapan sistem pengendalian intern yang semakin baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya jika penerapan sistem pengendalian intern kurang baik akan

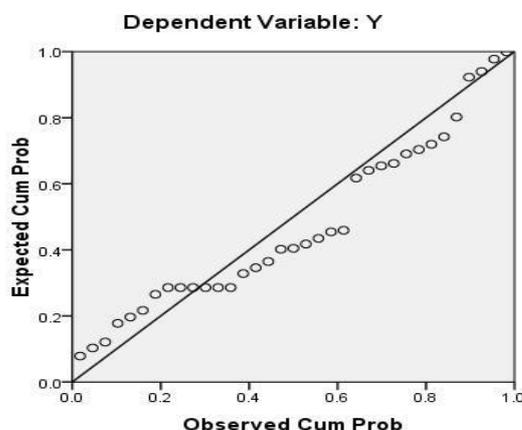
menurunkan kualitas laporan keuanga pemerintah daerah. (3) Kompetensi staf akuntansi yang semakin baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya kompetensi staf akuntansi yang kurang baik akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variable *dependen* (terikat) dan variable *independen* (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Normal P-P Plot dan Diagram Histogram yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar disekitar garis diagonal. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis normal seperti yang dapat dilihat pada gambar 1 :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Primer diolah

Gambar 1 : Uji Normalitas

Berdasarkan pada gambar 1 *Normal P- P Plot Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari grafik pada pengujian normalitas dapat diketahui bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum. Prob.*) dengan sumbu X

(*Observed Cum Prob.*) Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila dari hasil pengujian diperoleh nilai TOL lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF menunjukkan kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas (Ghozali, 2011:106).

**Tabel 12 Hasil Uji Muktikolinieritas**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	<b>6.823</b>	3.353		2.035	.051		
X1	<b>.297</b>	.121	.418	2.457	.020	.413	2.422
X2	<b>.196</b>	.132	.247	1.481	.149	.430	2.328
X3	<b>.212</b>	.188	.213	1.130	.267	.338	2.962

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai  $TOL > 0,10$  dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai  $VIF < 10$ . Maka

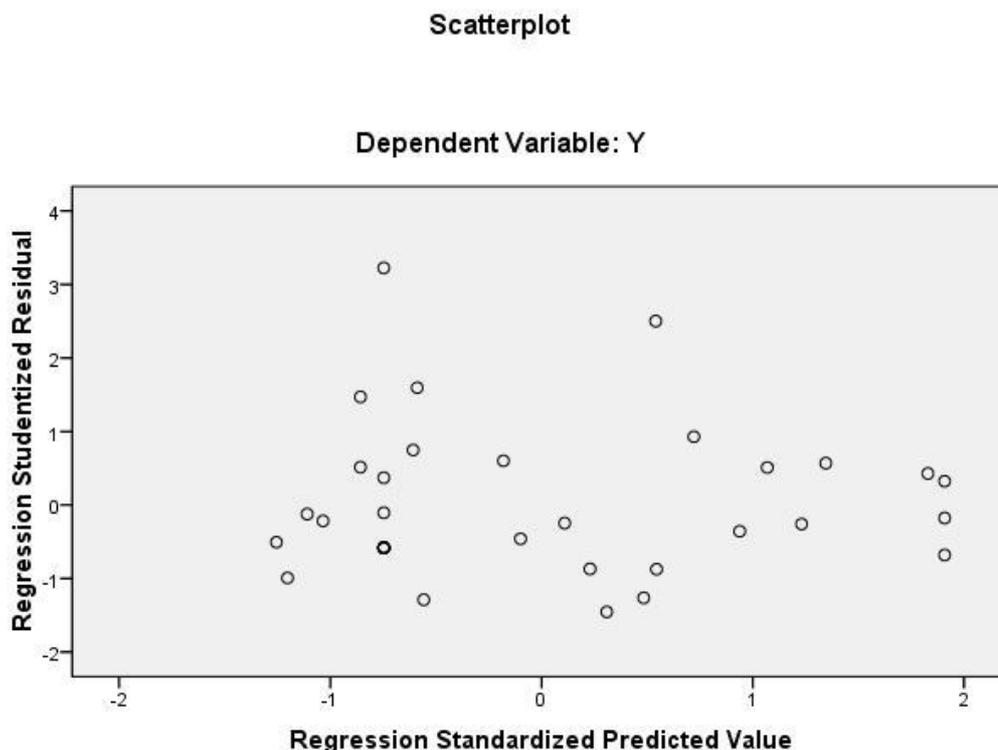
dapat disimpulkan bahawa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi, terjadi perbedaan varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika varian

berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar hasil SPSS berikut ini :



Sumber : Data Primer diolah

Gambar 2 : Uji Heteroskedastisitas

Dari Gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisa lebih lanjut.

#### 4.5 Uji Hipotesis

##### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *Goodness Offit* untuk diolah lebih lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Hasil dari uji kelayakan model yang disajikan pada tabel 13.

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	245.431	3	81.810	17.522	.000 <sup>a</sup>
	Residual	144.741	31	4.669		
	Total	390.171	34			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel 13 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 17,522 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa

model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R<sup>2</sup> sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 14 sebagai berikut :

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.793 <sup>a</sup>	.629	.593	2.16080

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah

Hasil Uji koefisien determinasi berganda dapat diketahui R *square* (R<sup>2</sup>) sebesar 0,629 atau 62,9% yang menunjukkan kontribusi dari variabel standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf akuntansi terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

adalah sebesar 62,9%. Sedangkan sisanya 37,1% dikontribusi oleh faktor lainnya diluar model penelitian. Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara simultan antara variabel variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan

dengan (R) sebesar 0,793 atau 79,3% yang mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf akuntansi terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada tabel 15 berikut :

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.823	3.353		2.035	.051
	X1	.297	.121	.418	2.457	.020
	X2	.196	.132	.247	1.481	.149
	X3	.212	.188	.213	1.130	.267

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 15 dapat diinterpretasikan sebagai berikut : (1) Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,020 < 0,05$  dan hipotesis diterima. (2) Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan signifikan sebesar  $0,149 > 0,05$  dan hipotesis ditolak. (3) Kompetensi staf akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,267 > 0,05$  dan hipotesis ditolak.

### 4.6 Pembahasan

#### Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya

Hasil penelitian menemukan bahwa standar akuntansi pemerintah memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai signifikansi sebesar  $0,020 < 0,05$ . Sosialisasi terus-menerus yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya tentang pemahaman standar akuntansi pemerintah yang dipakai yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun

2010 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya semakin memudahkan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat waktu dan meminimalisir kesalahan pencatatan dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2008) dan Andini (2015), yang mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya**

Hasil penelitian menemukan bahwa sistem pengendalian intern memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi sebesar  $0,149 > 0,05$ . Sistem pengendalian intern yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Sistem pengendalian intern belum berfungsi mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mokoginta, *et al* (2017) bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan penelitian Indriya (2013) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya**

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan - pelatihan, dan juga

mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Famela (2013) dan Andini (2015) yang mengemukakan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil berbeda diungkap dalam penelitian ini, yang menemukan bahwa kompetensi staf akuntansi memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai signifikansi sebesar  $0,267 > 0,05$ . Terlihat dalam deskripsi penelitian yang menunjukkan bahwa responden berasal dari latar belakang pendidikan non akuntansi yaitu sebesar 66%. Hal ini menunjukkan bahwa posisi bagian akuntansi lebih didominasi memiliki latar belakang pendidikan non akuntansi. Namun dengan latar belakang pendidikan non akuntansi tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

## **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN BATASAN PENELITIAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Berdasarkan uji kelayakan model diketahui bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Staf Akuntansi layak digunakan dalam penelitian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. (2) Pengujian terhadap standar akuntansi pemerintah memberikan

pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai signifikansi sebesar  $0,020 < 0,05$ , mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, sehingga dapat tepat waktu dalam melaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan meminimalisir kesalahan pencatatan dalam proses penyusunan laporan keuangannya. (3) Pengujian terhadap sistem pengendalian intern memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi sebesar  $0,149 > 0,05$ , mengindikasikan bahwa, sistem pengendalian intern yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan uang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. (4) Pengujian terhadap kompetensi staf akuntansi memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai signifikansi sebesar  $0,267 > 0,05$ , terjadi karena posisi bagian akuntansi di Pemerintahan Kota

Surabaya yang lebih didominasi memiliki latar belakang pendidikan non akuntansi namun tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

### 5.2 Implikasi

Kepada pihak terkait dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Surabaya, untuk lebih meningkatkan fungsi sistem pengendalian intern dalam rangka menunjang kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

### 5.3 Saran

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah misalnya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D. dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi I* Vol. 24 No. 1 Juni 2015.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriya, K. 2013. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan : Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Bandung : Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI.
- Kurnia dan I. Famela. 2013. Pengaruh kompetensi pegawai dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung. *Skripsi*. Bandung : Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mokoginta, N., L. Lambey, dan W. Pontoh. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 874-890.
- Nugraheni, P. dan I. Subaweh. 2008. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 1 Vol. 13.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

---

\_\_\_\_. Nomor 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

\_\_\_\_. Nomor 60 Tahun 2008  
tentang Sistem Pengendalian  
Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
59 Tahun 2007 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sugiyono. 2004. *Statistika Untuk  
Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013  
tentang Pedoman Penyusunan  
Standar Kompetensi Manajerial  
Pegawai Negeri Sipil.